



Laporan Tahunan

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

2021

Kata Pengantar

Keterbukaan informasi merupakan kewajiban penyelenggara negara yang harus diwujudkan dalam negara demokrasi. Di Indonesia, keterbukaan informasi dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagi Badan POM, keterbukaan informasi sejalan dengan misi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan guna memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta memberikan pelayanan publik yang prima.

Badan POM telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2011 melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011. PPID merupakan salah satu garda terdepan Badan POM dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi tentang pengawasan Obat dan Makanan.

Pada tahun 2021, struktur organisasi PPID mengalami perubahan seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Badan POM dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan POM.

Badan POM terus mengembangkan berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi terkini untuk semakin mempermudah masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan, juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam penyediaan, pelayanan dan penyebarluasan informasi publik. Pada tahun 2021, Badan POM kembali memperoleh predikat "Informatif" dengan nilai 95,43 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat.

- Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan POM Tahun 2021 ini menyampaikan informasi terkait upaya-upaya penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan POM selama tahun 2021. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Badan POM.

Jakarta, 30 Maret 2022
PPID Utama Badan POM



Reghi Perdana, SH., LLM

Ringkasan Eksekutif

Keterbukaan informasi memiliki peran yang strategis dalam mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan guna melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima.

Keterbukaan informasi sangat mendukung penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yaitu mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, memudahkan pelaku usaha dalam mengakses regulasi/kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Badan POM, pada tahun 2021 struktur organisasi PPID Badan POM mengalami perubahan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan POM.

Pada tahun 2021, PPID Badan POM telah menerima 85 permintaan informasi dengan rata-rata waktu penyelesaian yaitu 4,42 hari kerja. Sebanyak 76 (89,41%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya; 6 (7,06%) permintaan informasi dikabulkan sebagian; dan 3 (3,53%) permintaan informasi ditolak. Alasan permintaan informasi dikabulkan sebagian dan ditolak adalah merupakan informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dikuasai.

PPID Badan POM terus melakukan berbagai upaya penguatan terkait keterbukaan informasi publik, antara lain penguatan regulasi, penguatan Sumber Daya Manusia, penguatan pelayanan informasi publik, penguatan publikasi informasi publik melalui berbagai media, serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi.

Sebagai bukti komitmen dalam implementasi keterbukaan informasi publik, Badan POM telah berhasil meraih Anugerah Badan Publik “Informatif” berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat pada Tahun 2021. Badan POM berhasil meraih peringkat ke-6 kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 95,43, meningkat dari tahun 2020 yang memperoleh nilai 94,09.

Daftar Isi

	Hal
KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR LAMPIRAN.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR GRAFIK.....	6
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN POM.....	7
A. Struktur Organisasi PPID Badan POM.....	8
B. Tugas dan Fungsi.....	9
C. Visi PPID Badan POM.....	9
D. Maklumat Layanan PPID Badan POM.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN POM.....	11
A. Sarana Layanan.....	11
B. Sumber Daya Manusia (SDM).....	13
C. Anggaran.....	13
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	14
A. Layanan Informasi Publik.....	14
B. Layanan Pengajuan Keberatan.....	20
C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	20
D. Pengumuman dan Pemutakiran Informasi Publik.....	21
BAB IV KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2021.....	25
BAB V KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	31
A. Kendala Eksternal.....	31
B. Kendala Internal.....	31
BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	32

Daftar Lampiran

	Hal
Lampiran 1 DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BADAN POM TAHUN 2021.....	34
Lampiran 2 TABEL ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PPID TAHUN 2021.....	40
Lampiran 3 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PPID BADAN POM TAHUN 2021.....	41
Lampiran 4 RINGKASAN LAPORAN PERMINTAAN INFORMASI PPID UTAMA BADAN POM TAHUN 2021.....	42
Lampiran 5 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PPID PELAKSANA UNIT KERJA BADAN POM TAHUN 2021.....	43
Lampiran 6 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PPID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN POM TAHUN 2021.....	44

Daftar Gambar

	Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi PPID Badan POM.....
Gambar 1.2	Maklumat Pelayanan PPID Badan POM.....
Gambar 2.1	Ruang Tunggu Layanan.....
Gambar 2.2	Ruang Layanan Informasi Publik.....
Gambar 2.3	Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2021.....
Gambar 2.4	Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2021.....
Gambar 3.1	Informasi Publik pada Subsite PPID Badan POM.....
Gambar 3.2	Pengumuman Informasi Publik pada Media Sosial PPID Badan POM.....
Gambar 3.3	Subsite PPID Pelaksana Teknis Badan POM.....
Gambar 3.4	Pengumuman Informasi Publik pada Media Sosial PPID Pelaksana Teknis Badan POM.....
Gambar 4.1	Tampilan baru subsite PPID (www.ppid.pom.go.id).....
Gambar 4.2	INTIPS Podcast “Buka Informasi, Hak Kamu untuk Tahu!”.....
Gambar 4.3	Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan PPID Tahun 2021.....
Gambar 4.4	Rapat Koordinasi Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Rakontek PPID) Tahun 2021.....
Gambar 4.5	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.....



Daftar Grafik

Grafik 3.1	Statistik Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Badan POM Tahun 2021.....	14
Grafik 3.2	Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik PPID Utama Tahun 2021.....	15
Grafik 3.3	Profil Profesi Pemohon Informasi Publik ke PPID Utama Tahun 2021.....	15
Grafik 3.4	Jenis Data yang Diminta Berdasarkan Komoditi.....	16
Grafik 3.5	Tujuan Permohonan Informasi Publik ke PPID Utama Tahun 2021.....	16
Grafik 3.6	Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Informasi Publik PPID Utama Tahun 2021.....	17
Grafik 3.7	Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik PPID Pelaksana Unit Kerja Badan POM Tahun 2021.....	17
Grafik 3.8	Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Unit Kerja Badan POM Tahun 2021.....	18
Grafik 3.9	Statistik Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana UPT Badan POM Tahun 2021.....	19
Grafik 3.10	Profil Profesi Pemohon Informasi Publik ke PPID Pelaksana UPT Badan POM Tahun 2021.....	19
Grafik 3.11	Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana UPT Badan POM Tahun 2021.	20



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN POM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Keduanya mengamanahkan Badan Publik untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di Badan POM memiliki peran yang strategis dalam mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan 3 (tiga) pilar sistem pengawasan Obat dan Makanan.

Pilar pertama yaitu Badan POM, keterbukaan informasi mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan. Melalui keterbukaan informasi, kinerja pengawasan Obat dan Makanan dapat dipantau oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan good and clean governance (pemerintahan yang baik dan bersih) di lingkungan Badan POM.

Pilar kedua yaitu pelaku usaha, keterbukaan informasi memudahkan pelaku usaha dalam mengakses regulasi/kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sehingga mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu serta berdaya saing.

Pilar ketiga yaitu masyarakat, keterbukaan informasi publik memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga dapat terwujud masyarakat yang informatif dan cerdas yang mampu memilih dan mengonsumsi produk Obat dan Makanan yang aman serta dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagaimana amanah Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional Ke-88 Tahun 2021, bahwa tantangan pengelolaan informasi akan semakin besar. Digitalisasi informasi akan semakin mempermudah masyarakat mengakses informasi. Karena itu, Badan Publik harus bersama-sama menjaga agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, berkualitas, dan edukatif. Selain itu, Badan Publik juga harus meningkatkan literasi informasi kepada masyarakat, dan kreatif mengembangkan kanal-kanal baru yang kreatif agar diminati masyarakat untuk memperoleh informasi yang sehat dan akurat.

Pada tahun 2011, upaya Badan POM untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dimulai dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. PPID merupakan salah satu garda terdepan Badan POM dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi tentang pengawasan Obat dan Makanan. Secara umum, tugas PPID Badan POM yaitu melaksanakan pelayanan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi, dan membuat laporan rekapitulasi layanan informasi yang diterima Badan POM.

Pada tahun 2021, struktur organisasi PPID mengalami perubahan seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Badan POM dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan POM. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan POM, juga dibentuk Tim Penghubung PPID di lingkungan Badan POM tahun 2021 yang beranggotakan perwakilan dari unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.21.217 Tahun 2021 tentang Penunjukan Tim Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan POM Tahun 2021.

A. Struktur Organisasi PPID Badan POM

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan POM, PPID Badan POM terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan PPID;
4. PPID Utama;
5. PPID Pelaksana Unit Kerja; dan
6. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Badan POM



B. Tugas dan Fungsi

PPID Utama Badan POM memiliki tugas dan fungsi:

1. melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik;
2. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
4. melakukan pengujian konsekuensi informasi publik;
5. mengklasifikasikan informasi publik dan/atau perubahannya;
6. menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik;
7. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualianya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan;
9. membuat Surat Keputusan PPID Badan POM tentang Penolakan Permohonan Informasi;
10. menetapkan maklumat layanan informasi publik;
11. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik;
12. menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Atasan PPID, Kepala Badan POM, dan Komisi Informasi Pusat secara berkala; dan
13. melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

C. Visi dan Misi

VISI

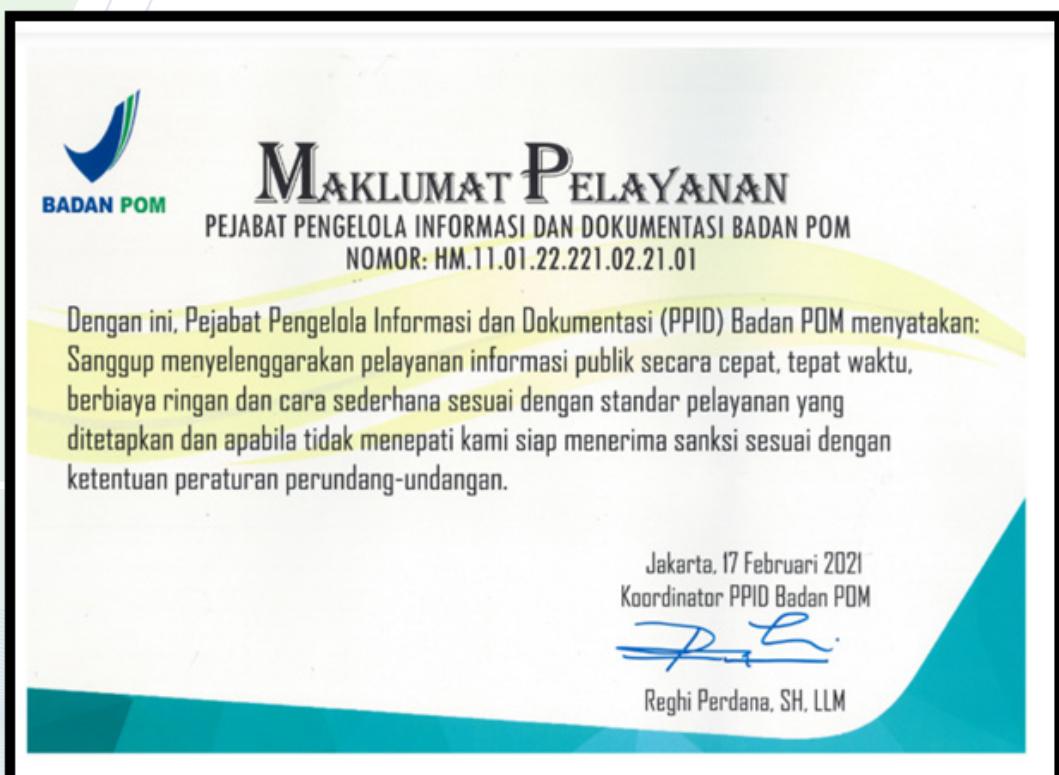
Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang obat dan makanan.

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses; dan
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

D. Maklumat Layanan

“Dengan ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM menyatakan: Sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”



Gambar 1.2 Maklumat Pelayanan PPID Badan POM

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN POM

A. Sarana Layanan

Ketersediaan sarana komunikasi merupakan salah satu faktor yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik di Badan POM. Berbagai inovasi media layanan informasi diciptakan mengikuti perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Meskipun berlangsungnya kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2021, menyebabkan layanan PPID dilakukan secara *online* dan meniadakan layanan datang langsung. Berbagai inovasi media layanan dan sosialisasi informasi publik terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPID Badan POM. Media layanan PPID Badan POM yaitu:

1. Datang Langsung/Alamat surat : Ruang Layanan PPID
Gedung Athena Lantai 6
Jl. Percetakan Negara No. 23
Jakarta Pusat 10560
2. *Email* : ppid@pom.go.id
3. *Subsite* : <https://ppid.pom.go.id>
4. *Website* : <https://pom.go.id>
5. *Media sosial* : *Twitter* @PPIDBadanPOM
Instagram @ppid_badanpom
6. *Aplikasi Android* : PPID BPOM Mobile



Gambar 2.1 Ruang Tunggu Layanan



Gambar 2.2 Ruang Layanan Informasi Publik

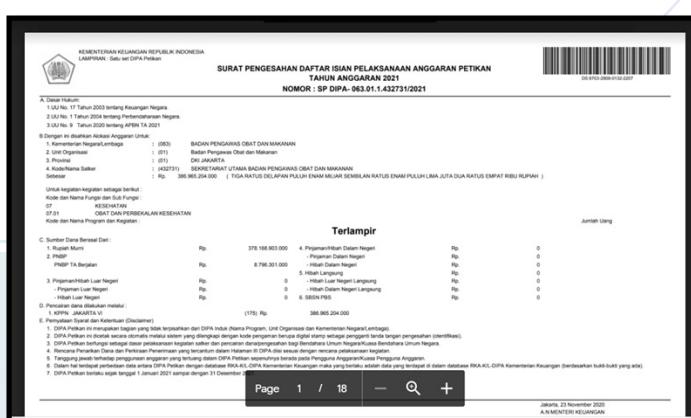
B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Implementasi keterbukaan informasi memerlukan dukungan SDM yang kuat, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi yang memadai. PPID Utama Badan POM didukung oleh SDM sebanyak 23 orang, dengan latar belakang pendidikan Sarjana (43,48%), Apoteker (34,78%), dan Magister (21,74%). Sementara itu PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT berjumlah 108 orang dengan latar belakang pendidikan Sarjana (25,93%), Apoteker (43,52%), dan Magister (30,56%).

Adanya perkembangan kebutuhan masyarakat akan informasi sehingga menuntut Badan POM untuk terus meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kompetensi SDM pengelola layanan informasi publik harus terus ditingkatkan menyesuaikan dengan tuntutan kondisi terkini. Pada tahun 2021 telah dilakukan berbagai peningkatan kompetensi, baik yang diselenggarakan internal Badan POM, maupun yang diselenggarakan badan publik lain. Adapun daftar peningkatan kompetensi SDM PPID Badan POM pada tahun 2021 sebagaimana [Lampiran 1](#).

C. Anggaran

Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan POM pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp76.520.413.000,- atau 17,88% dari DIPA Sekretariat Utama dan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar Rp428.069.147.000,-



Gambar 2.3 Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2021



Gambar 2.4 Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2021

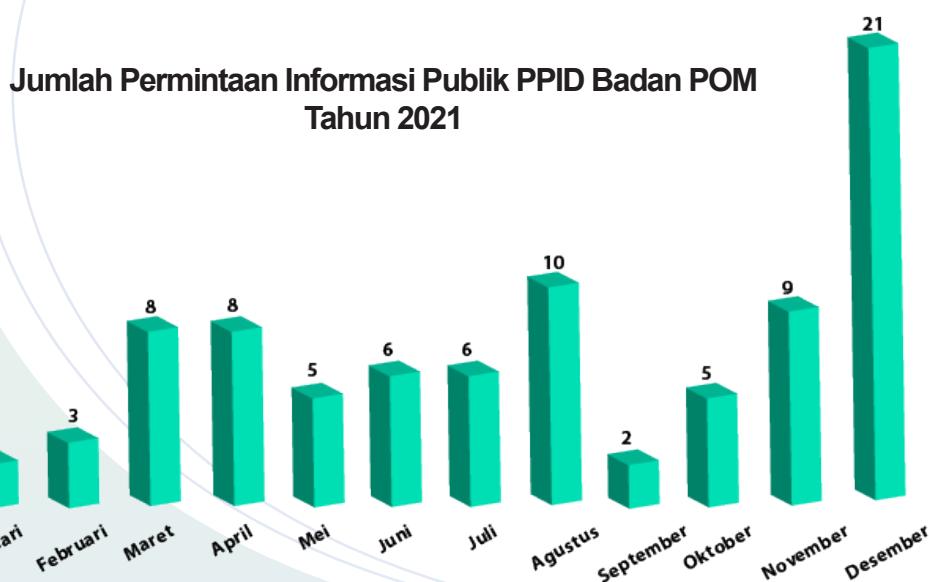
BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

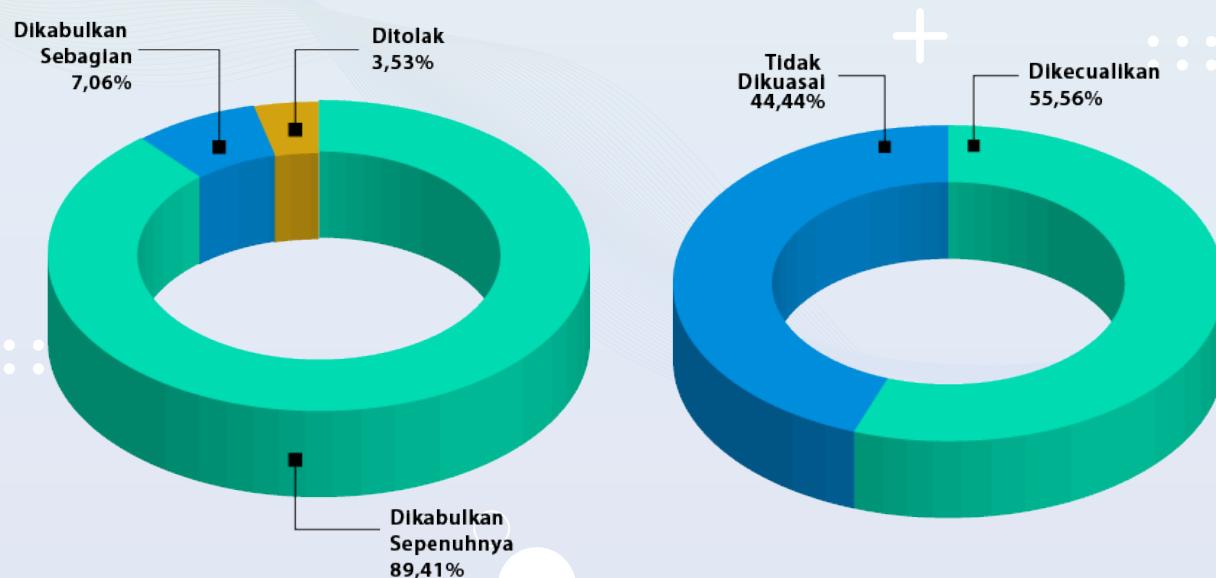
A. Layanan Informasi Publik

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2021, PPID Badan POM telah menerima 85 permintaan informasi dengan rincian 76 (89,41%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya; 6 (7,06%) permintaan informasi dikabulkan sebagian; dan 3 (3,53%) permintaan informasi ditolak. Alasan permintaan informasi dikabulkan sebagian dan ditolak adalah merupakan informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dikuasai.



Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian



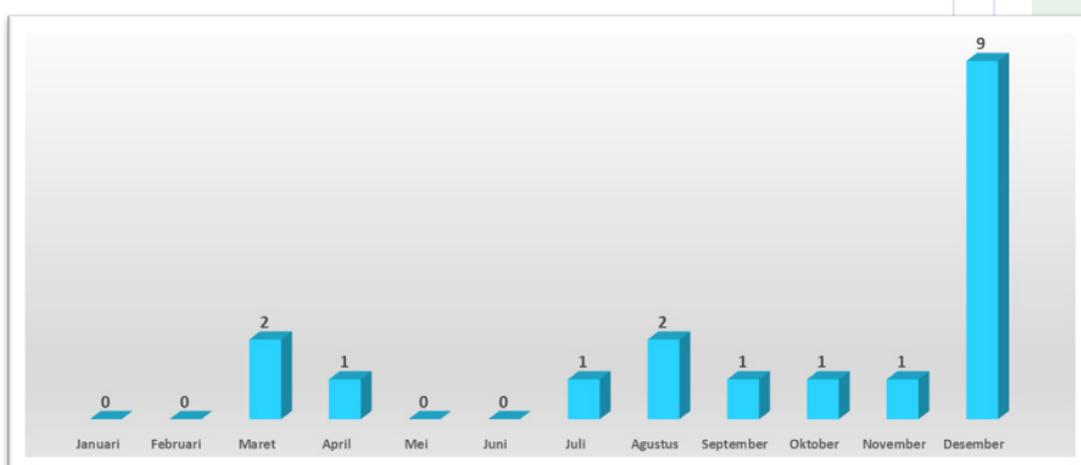
Grafik 3.1 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik
PPID Badan POM Tahun 2021

Rata-rata waktu penyelesaian layanan permintaan informasi yaitu 4,42 hari kerja. Pemenuhan jangka waktu penyelesaian layanan permohonan informasi publik (maksimal 17 hari kerja) mencapai 100%. Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID Badan POM tahun 2021 sebagaimana terlampir pada [Lampiran 3](#).

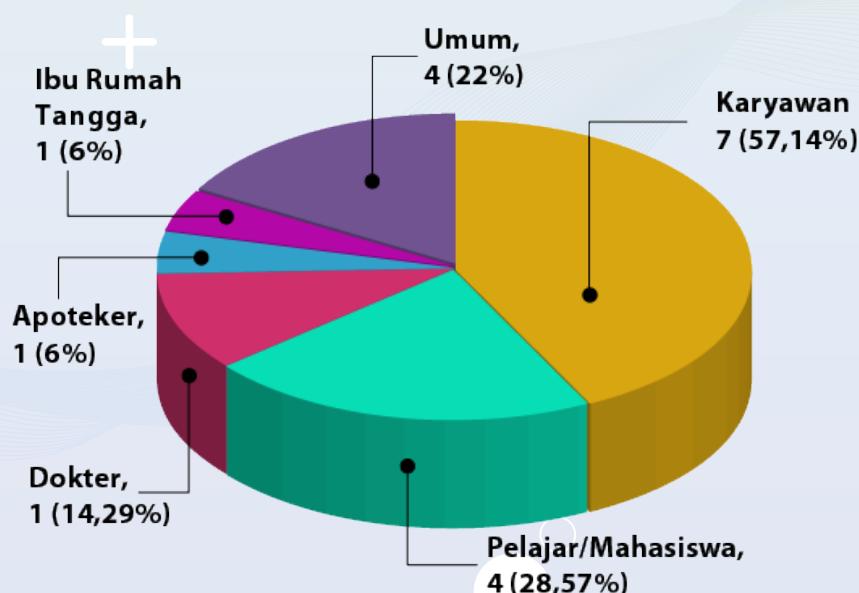
Dari total 85 permintaan informasi tersebut, meliputi 18 permintaan informasi ke PPID Pusat, 3 permintaan informasi ke PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat, dan 64 permintaan informasi ke PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Layanan Permintaan Informasi Publik PPID Utama Badan POM

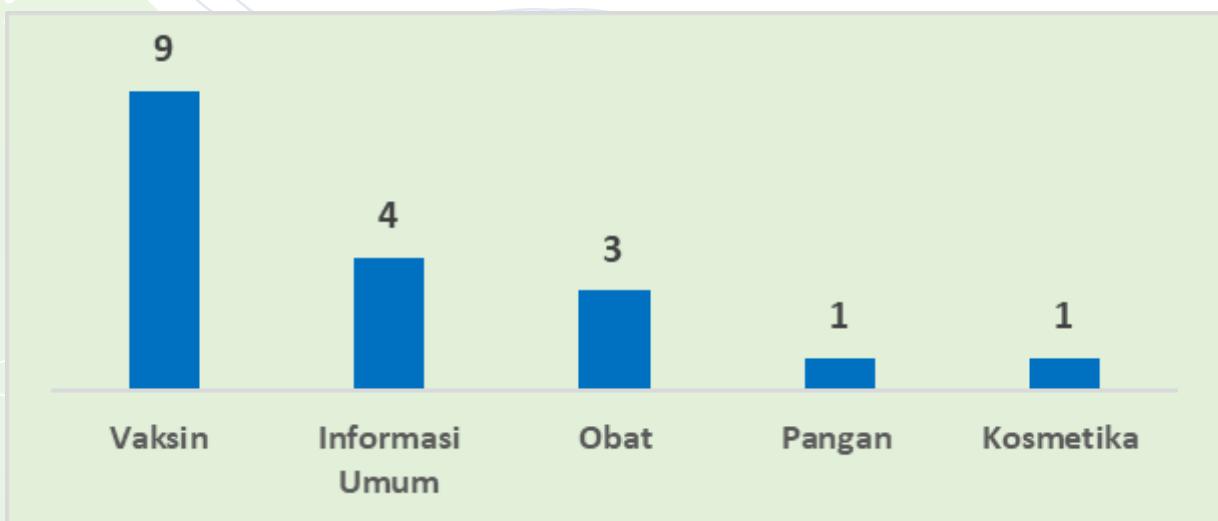
Pada tahun 2021, PPID Utama telah menerima 18 permintaan informasi dengan pemohon terbanyak dari profesi karyawan (38,89%), pelajar/mahasiswa (22,22%), dan masyarakat umum (22,22%). Ringkasan layanan permintaan informasi publik PPID Utama tahun 2021 sebagaimana [Lampiran 4](#).



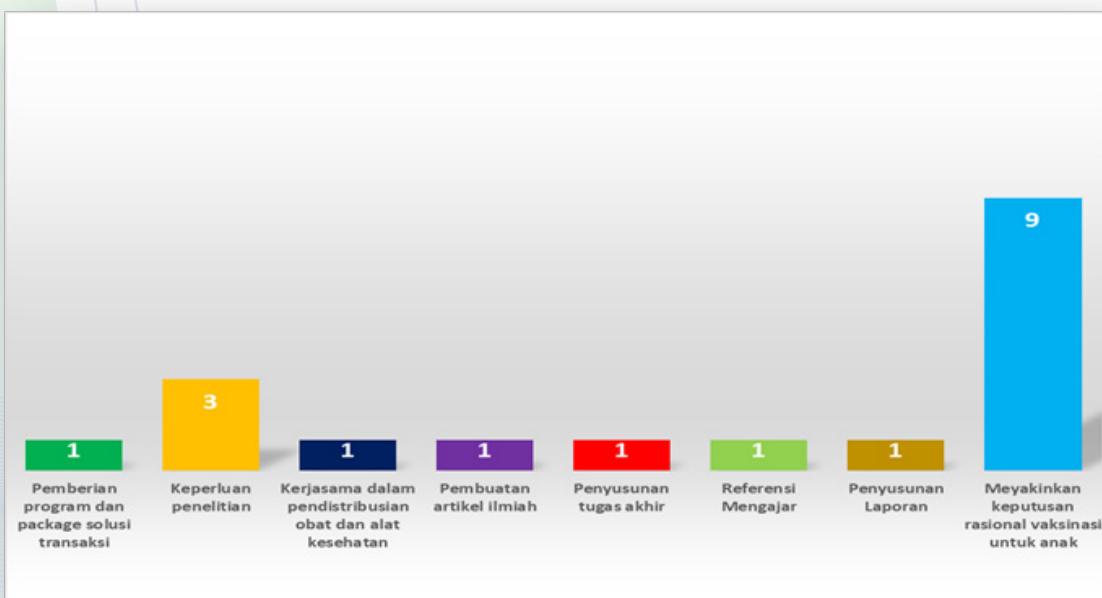
Grafik 3.2 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik PPID Utama Tahun 2021



Grafik 3.3 Profil Profesi Pemohon Informasi Publik ke PPID Utama Tahun 2021



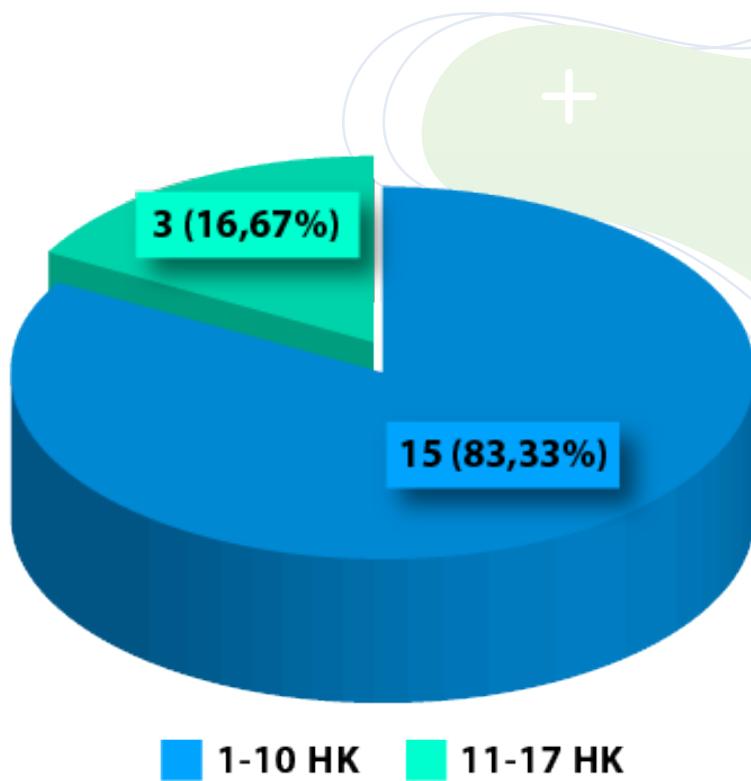
Grafik 3.4 Jenis Data yang Diminta Berdasarkan Komoditi



**Grafik 3.5 Tujuan Permintaan Informasi Publik ke PPID Utama
Tahun 2021**

Dari 18 permintaan informasi yang telah diselesaikan oleh PPID Utama tersebut, terdiri dari 13 (72,22%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 5 (27,78%) permintaan informasi dikabulkan sebagian dengan alasan ada sebagian informasi yang tidak dikuasai (dikuasai oleh instansi lain) dan merupakan informasi yang dikecualikan. Tidak ada permintaan informasi yang ditolak.

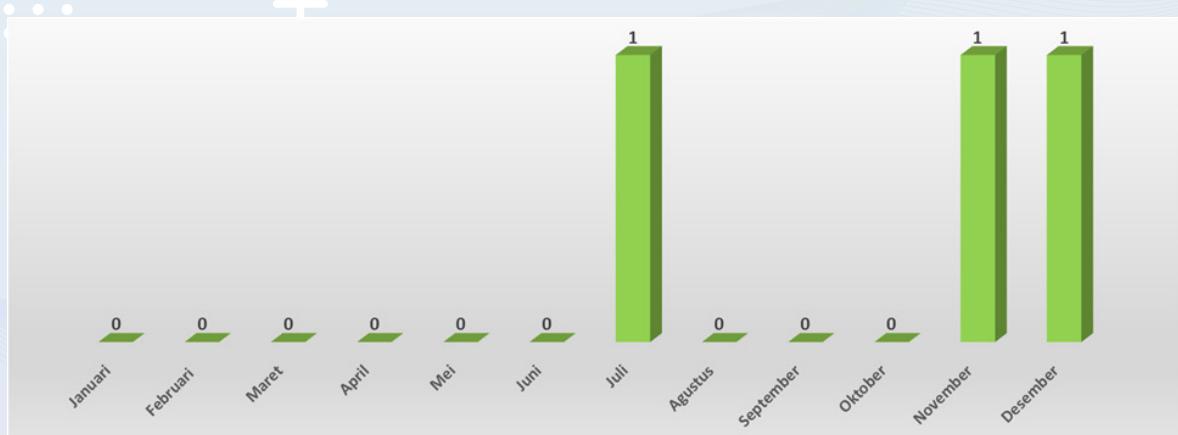
Rata-rata waktu penyelesaian layanan 8,06 hari kerja dengan pemenuhan jangka waktu penyelesaian layanan mencapai 100%.



Grafik 3.6 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Informasi Publik PPID Utama Tahun 2021

2. Layanan Permintaan Informasi Publik PPID Pelaksana Unit Kerja

Pada tahun 2021, PPID Pelaksana Unit Kerja yang terdiri dari 30 unit kerja di Badan POM pusat telah menerima 3 permintaan informasi yang seluruhnya dikabulkan sepenuhnya (100%). Pemohon informasi berasal dari profesi karyawan (100%), yaitu dari badan publik lain dan pelaku usaha. Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID Pelaksana Unit Kerja tahun 2021 sebagaimana [Lampiran 5](#).

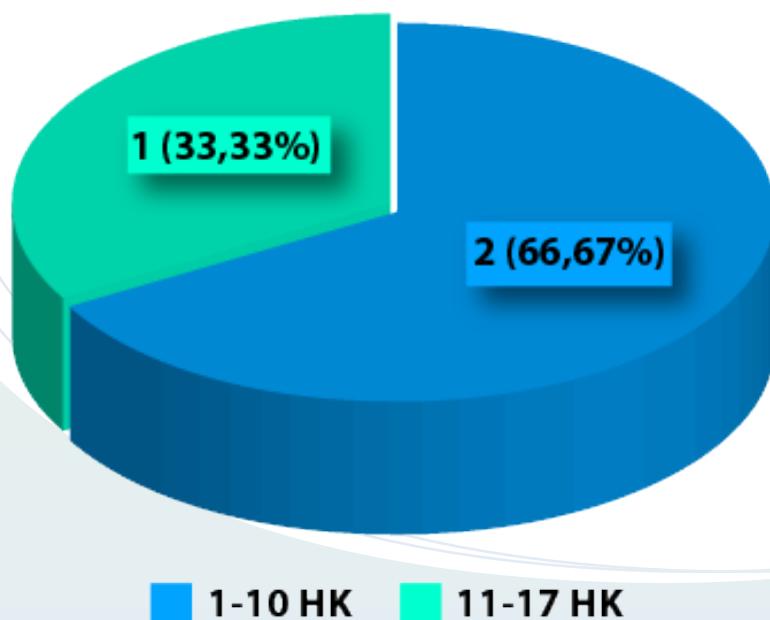


Grafik 3.7 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik PPID Pelaksana Unit Kerja Badan POM Tahun 2021

Data yang diminta yaitu:

- Laporan pelaksanaan pengadaan CPNS untuk tujuan pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Metode Analisis Benzo(a)piren pada pangan untuk tujuan digunakan sebagai metode uji pada Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan asap beku.
- Permintaan dokumen berupa brosur/leaflet pendaftaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika untuk tujuan pendaftaran produk.

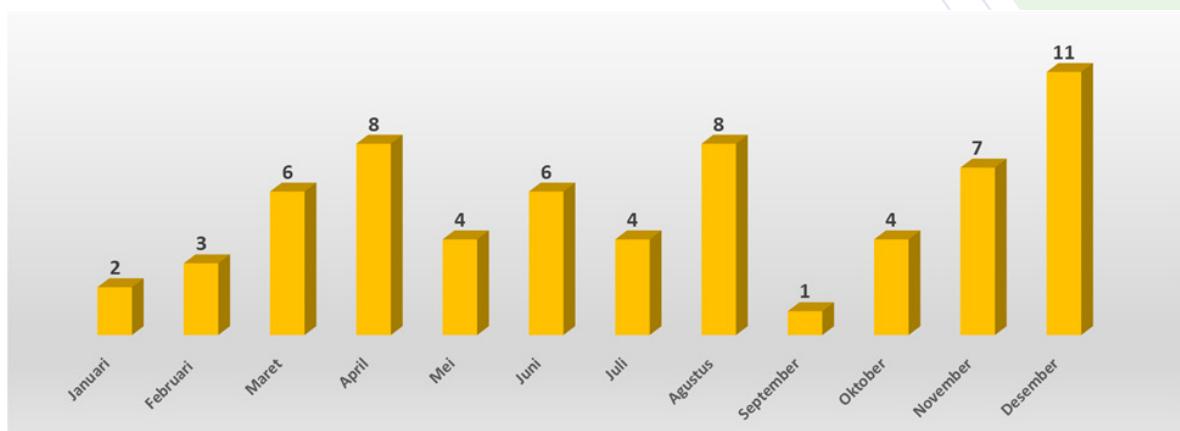
Rata-rata waktu penyelesaian layanan permintaan informasi ke PPID Pelaksana Unit Kerja yaitu 6 hari kerja dengan pemenuhan jangka waktu penyelesaian layanan mencapai 100%.



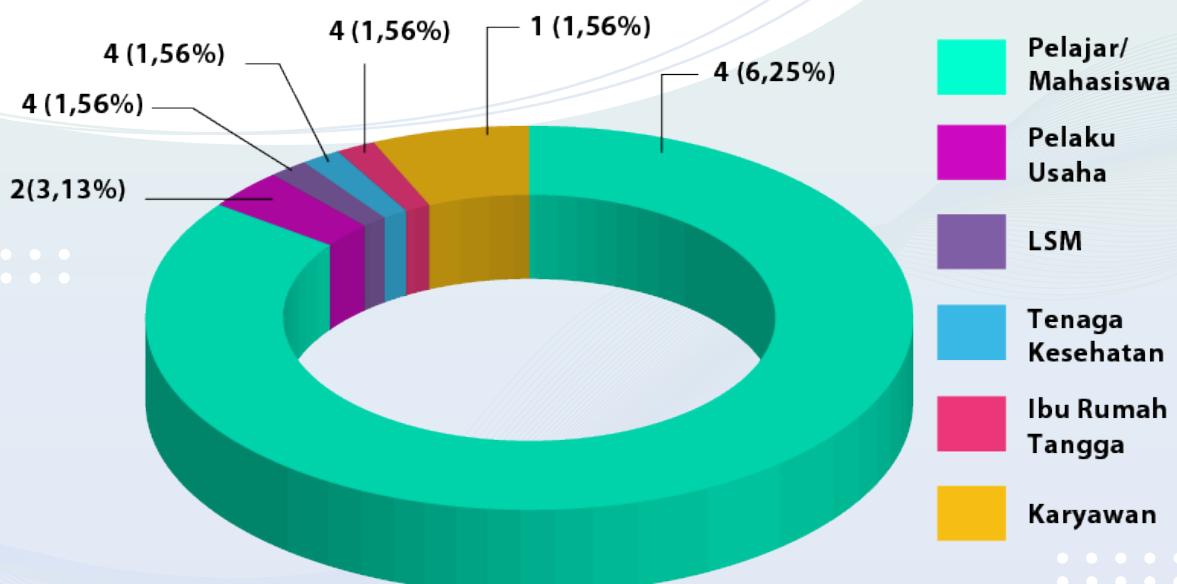
Grafik 3.8 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Unit Kerja Badan POM Tahun 2021

3. Layanan Permintaan Informasi Publik PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pada tahun 2021, PPID Pelaksana UPT yang terdiri dari 21 Balai Besar POM dan 13 Balai POM di seluruh Indonesia telah menerima 64 permintaan informasi. dengan rincian 60 (93,75%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 1 (1,56%) permintaan informasi dikabulkan sebagian, dan 3 (4,69%) permintaan informasi ditolak. Alasan permintaan informasi dikabulkan sebagian dan ditolak adalah merupakan informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dikuasai. Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID Pelaksana UPT tahun 2021 sebagaimana [Lampiran 6](#).



Grafik 3.9 Statistik Jumlah Permohonan Informasi Publik
PPID Pelaksana UPT Badan POM Tahun 2021

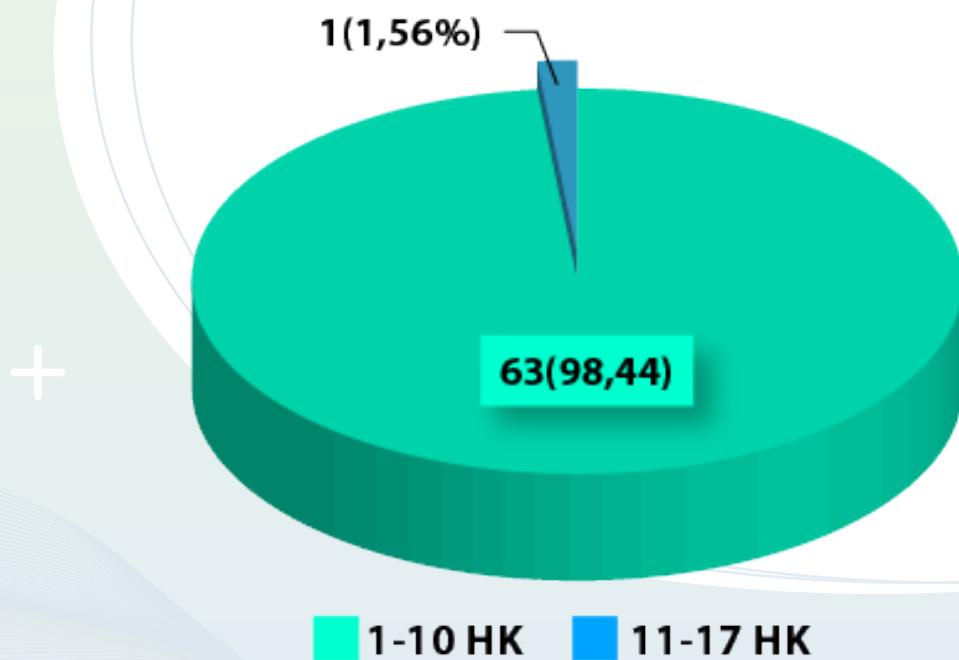


Grafik 3.10 Profil Profesi Pemohon Informasi Publik ke
PPID Pelaksana UPT Badan POM Tahun 2021

Data yang diminta antara lain terkait:

- Data organisasi, tugas, fungsi, dan hasil kinerja Badan POM sebagai bahan penyusunan tugas akhir dan penelitian
- Data produk obat dan makanan terdaftar di Badan POM untuk keperluan riset/penelitian.
- Data produk obat dan makanan ilegal untuk keperluan riset/penelitian.
- Data penggunaan bahan berbahaya pada produk pangan untuk keperluan riset/penelitian.
- Parameter pengujian obat dan makanan untuk keperluan riset/penelitian.

Rata-rata waktu penyelesaian layanan permintaan informasi ke PPID Pelaksana UPT yaitu 3,06 hari kerja dengan pemenuhan jangka waktu penyelesaian layanan mencapai 100%.



Grafik 3.11 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana UPT Badan POM Tahun 2021

B. Layanan Pengajuan Keberatan

Selama tahun 2021 PPID Badan POM tidak menerima pengajuan keberatan informasi publik.

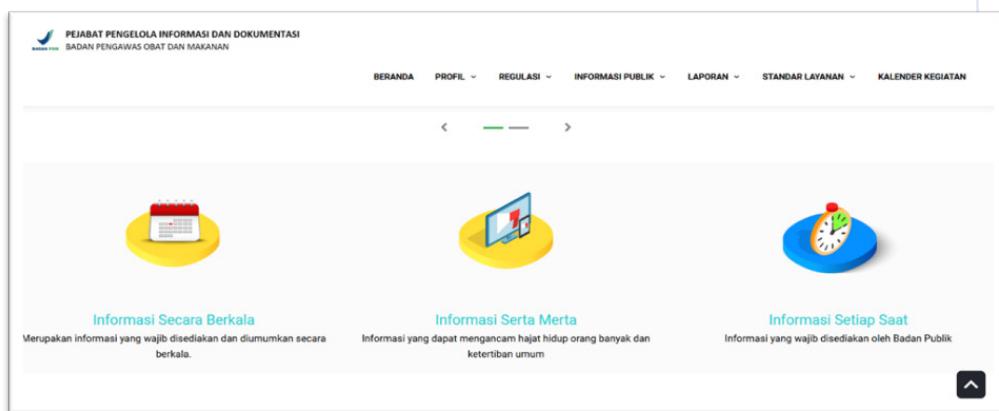
C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2021, terdapat 1 penyelesaian sengketa informasi publik yang merupakan kelanjutan atas pengajuan sengketa informasi tahun 2020. Penyelesaian sengketa memasuki tahap mediasi pada 10 Maret 2021, kemudian sidang adjudikasi pada 26 Maret 2021, dilanjutkan dengan sidang putusan akhir pada 9 Agustus 2021 dengan hasil putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi menyatakan menolak pengajuan sengketa pemohon karena informasi yang dimohon/diminta termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan berkaitan dengan proses hukum.

D. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik

Selama tahun 2021, telah dilakukan pengumuman dan pemutakhiran informasi publik di subsite ppid.pom.go.id, antara lain:

1. Informasi pada menu Profil: Sejarah PPID, Tugas dan Fungsi PPID, Struktur Organisasi PPID, dan Profil Pimpinan.
2. Informasi pada menu Regulasi: Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Rancangan Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik.
3. Informasi Berkala: Laporan Kinerja Badan POM Tahun 2020, Laporan Kinerja Unit Kerja Utama Tahun 2020, dan Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020.
4. Informasi Berkala: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk TA 2021.
5. Informasi Berkala: DIPA Petikan TA 2021 per-Satker.
6. Informasi Berkala: Laporan BMN TA 2020.



Gambar 3.1 Informasi Publik pada Subsite PPID Badan POM

7. Informasi Berkala: Laporan Keuangan (*Audited*) BPOM 2020.
8. Informasi Berkala: Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021.
9. Informasi Berkala: Perjanjian Kinerja Unit Kerja Utama Tahun 2021.
10. Informasi Berkala: Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2021.
11. Informasi Berkala: *Report to The Nation* 2020.
12. Informasi Setiap Saat: Majalah Pengawas Obat dan Makanan (MAPOM)
13. Informasi pada Menu Laporan: Ringkasan Laporan/Laporan Singkat PPID bulan Januari, Februari, Maret, Triwulan I, April, Mei, Juni, Triwulan II, Juli, Agustus, September, Triwulan III, Oktober, November, Desember dan Triwulan IV Tahun 2021.
14. Informasi pada Menu Laporan: Register Permohonan Informasi Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2021.
15. Informasi pada Menu Laporan: Register Keberatan Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2021.
16. Informasi pada Menu Laporan: Laporan PPID Tahun 2020.
17. Informasi pada Menu Laporan: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik 2021.
18. Informasi pada Menu Standar Layanan: Media Layanan, Maklumat Layanan, Biaya Layanan, Jadwal Layanan, Prosedur dan Persyaratan Permohonan Informasi Publik, Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Sengketa.
19. Informasi Kalender Kegiatan.

Selama tahun 2021, telah dilakukan pengumuman dan peutakhiran informasi publik di media sosial *Twitter* dan *Instagram* PPID Badan POM, antara lain:

1. Layanan Informasi Publik 2020.
2. Pengumuman Layanan Informasi Publik karena Gangguan Subsite PPID Badan POM.
3. Sengketa Informasi dan Mediasi.
4. Kinerja Pelayanan PPID BPOM Tahun 2020.
5. Informasi terkait regulasi di bidang Obat dan Makanan.
6. Informasi tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI.
7. Pengumuman Jadwal Pelayanan Informasi Publik ke PPID Badan POM selama Bulan Ramadan 1442 H.
8. Ajakan untuk *follow* Instagram PPID Badan POM (*ppid_badanpom*)
9. Kutipan pernyataan Romanus Ndau (Komisioner Komisi Informasi Utama) tentang keterbukaan informasi publik.
10. Kutipan pernyataan Elin Herlina (Sekretaris Utama BPOM) tentang komitmen BPOM mewujudkan keterbukaan informasi publik.
11. Kutipan pernyataan Reghi Perdana (PPID Utama BPOM) terkait ajakan untuk mengakses informasi publik BPOM.
12. Informasi tentang Aplikasi Istana UMKM.
13. Informasi mengenai Laporan Tahunan PPID BPOM Tahun 2020.
14. Data Layanan Informasi Publik PPID BPOM Triwulan I Tahun 2021.
15. Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020.
16. Berita tentang Bimtek Pengelolaan Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
17. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat: Dokumen Perencanaan Kinerja Badan POM 2021.
18. Informasi tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024.
19. Pengklasifikasian Informasi Publik.
20. Pengujian Konsekuensi.
21. Vaksin COVID-19 dengan EUA.
22. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non-Fisik POM).
23. Laporan Keuangan (*Audited*) Badan POM Tahun 2021.
24. Pengajuan Keberatan atas Informasi Publik.
25. Sengketa Informasi Publik, Persyaratan dan Prosedur Pengajuannya.
26. Informasi hasil pengawasan BPOM terhadap label/penandaan dan iklan Obat dan Makanan.
27. Laporan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik melalui PPID Tahun 2021.
28. BPOM *Operational Center*.
29. Dokumen *Report to The Nation* TW 1 2021.



Gambar 3.2 Pengumuman Informasi Publik pada Media Sosial PPID Badan POM

30. Perpustakaan Badan POM.
31. Organisasi PPID Badan POM.
32. Portal Pelayanan Publik BPOM.
33. Data Layanan Informasi Publik PPID BPOM Triwulan II Tahun 2021.
34. Diseminasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
35. Laporan Kinerja Deputi 4 Tahun 2020.
36. Video PPID dalam rangka Monev KIP.
37. Laporan Tahunan Badan POM 2020.
38. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.
39. Rapat Koordinasi Teknis PPID 2021.
40. *Report to The Nation* Triwulan II 2021.
41. *Best Practise Sharing* PPID Kementerian Pertanian.
42. Uji Klinik Obat dan Produk Biologi.
43. Daftar Informasi Publik.
44. Daftar Informasi Dikecualikan.
45. Data Layanan PPID sampai dengan Triwulan III 2021.

Selain melalui kanal *subsite* dan media sosial PPID Utama Badan POM, pengumuman dan pemutakhiran informasi publik juga dilakukan melalui *subsite* dan media sosial Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM.

The top screenshot displays a grid of links for various regional offices under 'Balai Besar POM' and 'Balai POM'. The bottom screenshot shows the homepage of the 'BPOM di Denpasar' subsite, featuring a large graphic and navigation menus.

Gambar 3.3 Subsite PPID Pelaksana Teknis Badan POM



Gambar 3.4 Pengumuman Informasi Publik pada Media Sosial PPID Pelaksana Teknis Badan POM

BAB IV+

KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2021

Pada tahun 2021, PPID Badan POM telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

- i. Pembaruan Struktur PPID Badan POM yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan POM No HK.02.01.1.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan POM, menyesuaikan dengan organisasi dan tata kerja baru Badan POM dan efektivitas pengelolaan pelayanan PPID.
- ii. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang dituangkan dalam Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HM.06.25.252.02.19.0401 Tahun 2021 Tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- iii. Pemutakhiran Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang dituangkan dalam Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.224.07.21.40 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Pengembangan subsite PPID (www.ppid.pom.go.id)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BERANDA PROFIL REGULASI INFORMASI PUBLIK LAPORAN STANDAR LAYANAN KALENDER KEGIATAN

Form Pengajuan

Anda dapat melakukan pengajuan terkait dengan permohonan informasi dan juga keberatan atas informasi.
Untuk tata cara mendapatkan informasi silakan klik di bawah ini.

Tata Cara Memperoleh Informasi ➔

Form Permohonan Informasi (AJUKAN) Form Pengajuan Keberatan (AJUKAN) Cek Permohonan Informasi (CEK) Cek Pengajuan Keberatan (CEK)

Infografis

JALAN SEJARAH

Tahukah Kamu Hak dan Kewajiban Badan Publik?

Apa itu Badan Publik?

Apa Hak dan Kewajiban Badan Publik?

Gambar 4.1 Tampilan baru subsite PPID (www.ppid.pom.go.id)

3. Pada 28 April 2021 diselenggarakan kegiatan **Informasi dan Tips (INTIPS) Podcast episode perdana dengan tema “Buka Informasi, Hak Kamu untuk Tahu!”** yang ditayangkan secara live melalui *Youtube* Badan POM RI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat atas haknya untuk memperoleh informasi, keterbukaan informasi publik di Badan POM, dan menyosialisasikan pelayanan informasi publik dan media informasi publik Badan POM. Kegiatan dihadiri oleh 639 orang peserta melalui *zoom meeting* dan 454 orang melalui *Youtube* Badan POM RI. Peserta berasal dari PPID Badan Publik, perwakilan organisasi profesi dan organisasi masyarakat, mahasiswa perguruan tinggi, masyarakat umum, dan perwakilan unit kerja dan UPT POM. Hadir sebagai narasumber adalah Sekretaris Utama Badan POM selaku Atasan PPID, Komisioner Komisi Informasi Pusat, dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan POM selaku PPID Utama Badan POM, serta dipandu oleh host Ario Astungkoro.



Gambar 4.2 INTIPS Podcast“Buka Informasi, Hak Kamu untuk Tahu!”

4. Pada 17 Juni 2021 diselenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** secara *hybrid* yaitu di *Harris Conventions Hall*, Summarecon Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat dan melalui aplikasi *Zoom Meeting Online*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PPID Badan POM tentang keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi publik dan pengajuan keberatan, pengelolaan informasi publik, penanganan sengketa informasi publik, dan penggunaan e-formulir PPID melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan (SIMPEL). Kegiatan dihadiri oleh 160 orang peserta terdiri atas PPID Utama, PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT, serta Tim Penghubung PPID Unit Kerja dan UPT. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Utama selaku Atasan PPID. Hadir sebagai narasumber yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan POM selaku PPID Utama Badan POM, PPID Bidang Pengelolaan Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi, serta PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.



Gambar 4.3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan PPID Tahun 2021

5. Pada 4 November 2021, Badan POM menggelar agenda tahunan **Rapat Koordinasi Teknis Pejabat(Rakontek) PPID Tahun 2021**, yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas PPID dan memperkuat koordinasi pengelolaan keterbukaan informasi publik di Badan POM. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Utama Elin Herlina ini, diikuti 403 peserta yang berasal dari PPID Utama, PPID Pelaksana dan Tim Penghubung PPID Unit Kerja dan UPT, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Badan POM.

Hadir sebagai narasumber, Wafa Patria Umma, Komisioner Komisi Informasi Pusat yang menyampaikan hal-hal terbaru yang terdapat dalam Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang SLIP). Terbitnya PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang SLIP menuntut Badan POM untuk segera melakukan penyesuaian regulasi terkait pengelolaan pelayanan informasi publik di Badan POM, serta melakukan berbagai terobosan/innovasi dan kolaborasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik yang berkelanjutan.

Narasumber lainnya adalah Kepala Biro Humas dan Informasi Publik (PPID Utama), Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, yang hadir membagikan *best practices* Kementerian Pertanian dalam implementasi keterbukaan informasi publik hingga membawa Kementerian Pertanian meraih nilai tertinggi di penilaian monev keterbukaan informasi publik di Indonesia tahun 2020 dan 2021.

Narasumber lainnya adalah Kepala Biro Humas dan Informasi Publik (PPID Utama), Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, yang hadir membagikan *best practices*

Kementerian Pertanian dalam implementasi keterbukaan informasi publik hingga membawa Kementerian Pertanian meraih nilai tertinggi di penilaian monev keterbukaan informasi publik di Indonesia tahun 2020 dan 2021.

Ke depan, PPID Utama Badan POM akan memperkuat pendampingan bagi PPID Pelaksana di lingkungan Badan POM termasuk pelaksanaan monev internal dan memperkuat pelayanan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, demi tetap menjadikan Badan POM sebagai Badan Publik Informatif.



Gambar 4.4 Rapat Koordinasi Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Rakontek PPID) Tahun 2021

6. Sepanjang tahun 2021, Badan POM berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam melakukan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik, khususnya dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, diantaranya kolaborasi dengan:
 - a. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Bersama KPCPEN, Badan POM menyelenggarakan konferensi pers bersama dengan narasumber juru bicara COVID-19 yang telah ditunjuk oleh Presiden. Selain itu, KPCPEN juga ikut menyebarluaskan siaran pers dan/atau penjelasan Badan POM terkait COVID-19, baik melalui *channel Youtube* atau menyebarluaskan kepada media partner KPCPEN.
 - b. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan POM menyelenggarakan konferensi pers bersama dengan narasumber juru bicara COVID-19 yang telah ditunjuk oleh Presiden. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga ikut menyebarluaskan siaran pers dan/atau penjelasan Badan POM terkait COVID-19, baik melalui *channel Youtube* atau menyebarluaskan kepada *media partner* Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 - c. Sekretariat Negara. Siaran pers Badan POM diunggah dalam *website* Sekretariat Negara.

- d. Sekretariat Presiden. Sekretariat Presiden menyelenggarakan konferensi pers dengan juru bicara COVID-19 dari Badan POM sebagai salah satu narasumber dan menayangkannya pada *channel Youtube*.
 - e. Dewan Perwakilan Rakyat. Kegiatan kunjungan DPR RI ke Badan POM dalam rangka penanganan COVID-19 dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan POM ditayangkan pada *channel Youtube* DPR RI.
 - f. Komisi Informasi Pusat. Perwakilan Komisi Informasi Pusat menjadi narasumber dalam kegiatan INTIPS Podcast Badan POM yang membahas mengenai keterbukaan informasi publik.
 - g. PPID Kota Semarang. Informasi mengenai tata cara notifikasi kosmetika Badan POM diunggah di *website* PPID Kota Semarang.
 - h. Perguruan Tinggi dan kalangan Akademisi. Perwakilan perguruan tinggi dan kalangan akademisi menjadi narasumber dalam berbagai webinar yang diselenggarakan Badan POM.
 - i. Tim Ahli dan Peneliti. Perwakilan tim ahli dan peneliti menjadi narasumber dalam konferensi pers dan berbagai webinar yang diselenggarakan Badan POM.
 - j. Media Massa. Media massa turut menyebarluaskan siaran pers dan penjelasan/ klarifikasi Badan POM terkait COVID-19.
 - k. Asosiasi Profesi. Bersama Badan POM, asosiasi profesi menyelenggarakan pameran tentang Obat dan Makanan.
 - l. Masyarakat dan pelaku usaha. Bersama Badan POM, masyarakat dan pelaku usaha menjadi duta penyampaian informasi tentang keamanan Obat dan Makanan.
7. Salah satu wujud komitmen Badan POM dalam implementasi keterbukaan informasi publik, yaitu dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahun. Pada tahun 2021, Badan POM berhasil meraih peringkat ke-6 kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sekaligus mempertahankan predikat Badan Publik “INFORMATIF” dengan nilai 95,43. Hasil ini diumumkan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, Selasa 26 Oktober 2021.





Gambar 4.5 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Eksternal

Dalam pengelolaan layanan informasi publik, PPID Badan POM masih menemukan beberapa kendala, antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga layanan informasi publik PPID yang merupakan kanal informasi resmi suatu instansi belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
- b. Layanan Informasi Publik PPID Utama maupun PPID Pelaksana unit kerja dan UPT belum dikenal luas oleh masyarakat.
- c. Pemohon Informasi publik belum sepenuhnya mengetahui dan memahami persyaratan permintaan informasi publik ke PPID.
- d. Masih belum tersosialisasikannya jenis informasi publik dan klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- e. Keterbukaan Informasi Publik ditujukan untuk pengembangan masyarakat secara individu maupun sosial, melindungi hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi, sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan Badan Publik, serta merupakan upaya mengembangkan masyarakat informatif. Namun pada kenyataannya, terdapat pihak yang memanfaatkan keterbukaan informasi dengan tujuan tertentu, misalnya untuk menghasut dan mencari-cari kesalahan penyelenggara negara.

B. Kendala Internal

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala internal yang dihadapi oleh PPID di lingkungan Badan POM antara lain:

- a. Masih terdapat kebijakan Badan POM yang harus disesuaikan dengan regulasi terbaru terkait Keterbukaan Informasi Publik yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Kurangnya pemahaman Petugas Pelayanan Informasi (PPI) PPID Pelaksana terhadap pengelolaan layanan informasi publik PPID.
- c. Perlunya penguatan komitmen dari seluruh perangkat PPID di lingkungan Badan POM, baik itu PPID Pelaksana unit kerja maupun PPID Pelaksana UPT, sehingga dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana,

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA

TINDAK LANJUT UNTUK

MENINGKATKAN KUALITAS

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan POM perlu melakukan berbagai upaya peningkatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yaitu:

- 1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM**
 - a. Finalisasi dan penetapan Peraturan Badan POM tentang Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan POM.
 - b. Penyusunan dan penetapan Keputusan Atasan PPID tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan pelaksanaan teknisnya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan PPID tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
 - c. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara berkala setiap tahun.
 - d. Reviu dan penyusunan SOP, yaitu:
 1. Standar Pengumuman;
 2. Standar Permintaan Informasi Publik;
 3. Standar Pengajuan Keberatan;
 4. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 5. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
 6. Standar Maklumat Pelayanan; dan
 7. Standar Pengujian Konsekuensi.
- 2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia**
 - a. Peningkatan koordinasi dalam penyediaan, pelayanan dan pengumuman informasi publik serta pendampingan PPID Pelaksana unit kerja dan UPT.
 - b. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan informasi PPID melalui forum konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, diseminasi, seminar, *benchmarking best practice* ke badan publik lainnya terkait pengelolaan pelayanan informasi publik.
- 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan POM.**



4. Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

- a. Dashboard PPID di Badan POM *Operational Center* (BOC) yang merupakan fasilitas dashboard untuk melakukan pemantauan dan evaluasi layanan PPID secara langsung dan *real time*.
- b. Pengembangan e-Survei Kepuasan Masyarakat (e-SKM) PPID.
- c. Pengembangan aplikasi e-Monev internal Keterbukaan Informasi Publik yang terhubung dengan *subsite* PPID (www.ppid.pom.go.id).
- d. Pengembangan Menu *subsite* PPID (www.ppid.pom.go.id) sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- e. Pengembangan *Subsite* PPID BPOM Terpadu (*Integrated Access for PPID*), yaitu mengintegrasikan *subsite* PPID Pelaksana unit kerja dan UPT dengan *subsite* PPID Badan POM.
- f. Pengembangan PPID BPOM Mobile Terpadu (*One Service App for PPID*), yaitu mengintegrasikan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pelaksana unit kerja dan UPT dengan PPID Badan POM.
- g. Pemanfaatan *sharing folder* dalam pendokumentasian informasi publik sehingga mempercepat penyediaan dan pemutakhiran informasi publik.

5. Peningkatan Publikasi dan Sosialisasi terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik Badan POM melalui Berbagai Media.

6. Optimalisasi Layanan Informasi Publik melalui Penerapan SOP secara Konsisten, Peningkatan Kecepatan Waktu Pelayanan Informasi Publik, serta Peningkatan Kolaborasi dengan Lintas Sektor.

LAMPIRAN LAPTAH PPID 2021

LAMPIRAN 1

DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BADAN POM TAHUN 2021

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek/Pelatihan/Diseminasi/ Sosialisasi/Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
1.	Webinar Literasi Vaksin Badan Publik	Zoom Meeting	27 Januari 2021	Komisi Informasi Pusat
2.	Webinar Keterbukaan Informasi Publik di Masa Pandemi	Zoom Meeting	29 Januari 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.	Sosialisasi Per.BPOM Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika dan Per.BPOM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik	Zoom Meeting	4 Februari 2021	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
4.	Webinar Epidemiologi Update Series II: Strategi Komunikasi Vaksinasi COVID-19: Bagaimana Menangkal Hoaks dan Mewujudkan Masyarakat Tangguh	Zoom Meeting	17 Februari 2021	Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto
5.	Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020	Zoom Meeting	17 Februari 2021	Biro Perencanaan dan Keuangan
6.	Webinar: "Siap Menghadapi Tantangan dengan <i>The New You!</i> (<i>New Year, New You</i>)"	Zoom Meeting	18 Februari 2021	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan dalam rangka jemput bola Registrasi Pangan Olahan Tahun 2021 Kolaborasi dengan Loka POM di Kabupaten Tangerang	Zoom Meeting	24 Februari 2021	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
8.	Seminar Daring <i>Five Reason Why to Developed Yourself in Workplace</i>	Zoom Meeting	25 Februari 2021	Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia
9.	Pelatihan Teknis Analisis Media Sosial untuk Komunikasi Publik Angkatan I Tahun Anggaran 2021	Zoom Meeting	15-18 Maret 2021	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
10.	Bimtek dalam Rangka Peningkatan Kualitas Peningkatan PMPRB Tahun 2021 dan Sosialisasi Aplikasi E-Monev RB	Zoom Meeting	15 Maret 2021	Inspektorat II

11.	Sosialisasi PP No. 5 tahun 2021 dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Badan POM tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Substansi Bidang Obat)	Zoom Meeting	18 Maret 2021	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
12.	Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Zoom Meeting	19 Maret 2021	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
13.	Sosialisasi Peraturan Badan POM di Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Zoom Meeting	19 Maret 2021	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
14.	Sharing Session dengan Pakar Komunikasi	Zoom Meeting	19 Maret 2021	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
15.	Forum Komunikasi Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dilaksanakan	Zoom Meeting	23 Maret 2021	Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
16.	Sosialisasi PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Konsultasi Publik Rancangan Peraturan BPOM tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko SubSektor OTSKKOS	Zoom Meeting	23 Maret 2021	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
17.	Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Peraturan Di Bidang Pangan Olahan Tahap II Tahun 2021	Zoom Meeting	24-26 Maret 2021	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
18.	Webinar Success to Change, Change to Success	Zoom Meeting	25 Maret 2021	Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan POM
19.	Bimbingan Teknis Aplikasi Mobile untuk Pengelolaan SP4N-LAPOR! dan Fitur Social Media Handler	Zoom Meeting	29 Maret 2021	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
20.	Bimbingan Teknis Petugas Penilaian Tingkat Dasar di Direktorat Registrasi	Zoom Meeting	29 Maret – 1 April 2021	Direktorat Registrasi Pangan

21.	Webinar online "Assertive Communication barriers and How to Become Over"	IDEAS (<i>Integrated Development and Training Information System</i>) PPSDM	31 Maret 2021	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan POM
22.	Webinar Cara Aman Menggunakan Obat Tradisional di Masa Pandemi	Zoom Meeting	6 April 2021	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
23.	Dialog Interaktif Prospektif Bisnis Kosmetik	Zoom Meeting	7 April 2021	Direktorat Pengawasan Kosmetik
24.	Sosialisasi Penyuluhan Hukum Terkait Permasalahan Hukum di Bidang Paten Merek dan Hukum Perusahaan	Zoom Meeting	8 April 2021	Biro Hukum dan Organisasi
25.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya Pada Sektor Obat dan Makanan	Zoom Meeting	15 April 2021	Biro Hukum dan Organisasi
26.	Webinar Penjelasan Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Zoom Meeting	21 April 2021	Komisi Informasi Pusat
27.	Pelatihan Teknis KIE Tingkat Pertama	Zoom Meeting	22 April – 6 Mei 2021	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
28.	INTIPS Podcast "Buka Informasi, Hak Kamu Untuk Tahu"	Zoom Meeting	28 April 2021	Biro Hukum dan Organisasi
29.	Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Setifikat Produksi Kosmetika Golongan B & Keputusan Kepala BPOM nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika	Zoom Meeting	28 April 2021	Diektorat Standarisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
30.	Forum Konsultasi Publik Evaluasi Kepuasan Masyarakat dan Standar Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan "Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengaduan untuk Perkuat Perlindungan Konsumen"	The Margo Hotel	30 April 2021	Biro Hukum dan Organisasi

31.	INTIPS Podcast "Belanja Online, Jangan Asal Klik!"	Zoom Meeting	3 Mei 2021	Biro Hukum dan Organisasi
32.	Forum Diseminasi Hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat	19-20 Mei 2021	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
33.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	The Margo Hotel, Depok	31 Mei 2021	Biro Hukum dan Organisasi
34.	Webinar dalam Rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 31 Mei 2021 dengan Tema "Sinergitas Pengawasan Produk Tembakau di Masa Pandemi COVID-19"	Zoom Meeting	2 Juni 2021	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
35.	Workshop Informasi dan Komunikasi Seri 1 - Pengelolaan Isu	Grand Mercure Kemayoran	2-4 Juni 2021	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
36.	Workshop Komunikasi dan Informasi Seri 2 - Dokumentasi dan Narasi	Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat	9-11 Juni 2021	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
37.	Lokakarya Mal Pelayanan Publik (MPP)	Zoom Meeting	14 Juni 2021	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
38.	Pelatihan Refreshment Asesor Kompetensi Skema DFI	Zoom Meeting	14-16 Juni 2021	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
39.	Workshop Informasi dan Komunikasi seri 3 - Membangun Konten Kreatif	Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat	14-16 Juni 2021	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
40.	Bimtek Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Harris Hotel Sumarecon Bekasi	17 Juni 2021	Biro Hukum dan Organisasi
41.	Bimtek Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Prima	Harris Hotel Sumarecon Bekasi	18-19 Juni 2021	Biro Hukum dan Organisasi
42.	Sosialisasi PENA SISOBAT dan Regulasi Terkini di Bidang Obat	Zoom Meeting	23 Juni 2021	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
43.	Webinar Bagaimana Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan?	Zoom Meeting	24 Juni 2021	Magnitude Indonesia
44.	Advokasi dan Sosialisasi Peraturan di Bidang Pangan Olahan Batch V	Zoom Meeting	28-30 Juni 2021	Dit Standardisasi Pangan Olahan
45.	Regional Workshop on ASEAN ex-Ante Regulatory	Zoom Meeting	8 Juli 2021	Kementerian Perdagangan

46.	Workshop "Online Counterfeit Products and Medicines – Risk and Solutions"	Zoom Meeting	14 Juli 2021	Dit. Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual
47.	Pelatihan Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Tingkat Kesulitan I	Zoom Meeting	2-8 Agustus 2021	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
48.	Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi di Bidang Obat dan Makanan II	Zoom Meeting	13-20 Agustus 2021	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
49.	Webinar <i>In House Training</i> Klaim Kosmetik - dr Fitria Agustina, SpKK, FINSDV (Topik: Jerawat dan Permasalahannya)	Zoom Meeting	19 Agustus 2021	Direktorat Pengawasan Kosmetik
50.	Webinar <i>In House Training</i> Klaim Kosmetik - dr. Wong Henri (Topik: Sediaan Kosmetika Rambut	Zoom Meeting	25 Agustus 2021	Direktorat Pengawasan Kosmetik
51.	<i>Sharing Knowledge OrangTua Angkat Jamu "Kiat Menembus Pasar Ekspor dan Bertahan di Industri"</i>	Zoom Meeting	26 Agustus 2021	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OTSKKOS
52.	Konsultasi Publik Revisi Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan Khusus Substansi Klaim Terkait Mikroorganisme	Zoom Meeting	24 September 2021	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
53.	Laporan Sosialisasi Teknik Pembuatan QR Code Peduli Lindungi dan Implementasinya oleh Pusdatin Kemenkes	Zoom Meeting	28 September 2021	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
54.	Bimbingan Teknis Petugas Penilaian Tingkat Medium di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Zoom Meeting	31 September 2021 - 3 Oktober 2021	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
55.	Workshop Sakti Batch 1	Zoom Meeting	4-8 Oktober 2021	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
56.	Sosialisasi Regulasi Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus	Zoom Meeting	6 Oktober 2021	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
57.	Talkshow Probiotik sebagai Produk Suplemen Kesehatan (Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik)	Zoom Meeting	7 Oktober 2021	Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

58.	Sosialisasi Pelaksanaan Special Access Scheme (SAS) Obat di Badan POM	Zoom Meeting	8 Oktober 2021	Direktorat Registrasi Obat
59.	Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika	Zoom Meeting	12 Oktober 2021	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
60.	Pelatihan Untuk Media Untuk Media Terkait Obat dan Vaksin di Masa Pandemi COVID-19	Zoom Meeting	19 Oktober 2021	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
61.	INTIPS Podcast "Tengok Labelnya, Jangan Tergiur Iklannya"	Zoom Meeting	2 November 2021	Biro Hukum dan Organisasi
62.	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Produk Tembakau	Zoom Meeting	3 November 2021	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
63.	Kecerdasan Emosi dalam rangka Optimalisasi Kinerja Pegawai	Zoom Meeting	24 November 2021	Biro Hukum dan Organisasi
64.	Sarasehan Jamu Nusantara: Jejak Empiris dengan Dukungan IPTEK Meningkatkan Daya Saing Produk Herbal Nasional	Zoom Meeting	2 Desember 2021	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
65.	Bimbingan Teknis Membangun Kesadaran Pegawai Terkait Pengelolaan Arsip	Zoom Meeting	15 Desember 2021	Biro Hukum dan Organisasi
66.	UMKM Camp Pangan Olahan bagi Pelaku Usaha di Peredaran	Zoom Meeting	23 Desember 2021	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha Pangan Olahan

LAMPIRAN 2

TABEL ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PPID TAHUN 2021

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan	Rp2,777,902,000	Rp2,773,705,708	99,84
2	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data, dan Informasi Obat dan Makanan	Rp41,043,200,000	Rp41,018,389,176	99,93

LAMPIRAN 3

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PPIID BADAN POM TAHUN 2021

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permintaan Dikabulkan		Jumlah Permintaan Ditolak	Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian	
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Didokumentasikan
Januari 2021	2	1 Hari Kerja	2	0	0	0	0
Februari 2021	3	3,33 Hari Kerja	3	0	0	0	0
Maret 2021	8	5,83 Hari Kerja	8	0	0	0	0
Triwulan I (Januari - Maret) 2021	13	3,39 Hari Kerja	13	0	0	0	0
April 2021	8	1,56 Hari Kerja	8	0	0	0	0
Mei 2021	5	10 Hari Kerja	5	0	0	0	0
Juni 2021	6	4,92 Hari Kerja	6	0	0	0	0
s/d Triwulan II (Januari - Juni) 2021	32	4,44 Hari Kerja	32	0	0	0	0
July 2021	6	6,83 Hari Kerja	6	0	0	0	0
Agustus 2021	10	2,25 Hari Kerja	9	1	0	0	1
September 2021	2	7,5 Hari Kerja	2	0	0	0	0
s/d Triwulan III (Januari - September) 2021	50	4,80 Hari Kerja	49	1	0	0	1
Oktober 2021	5	1,33 Hari Kerja	5	0	0	0	0
November 2021	9	5 Hari Kerja	9	0	0	0	0
Desember 2021	21	3,52 Hari Kerja	13	5	3	5	3
s/d Triwulan IV (Januari - Desember) 2021	85	4,42 Hari Kerja	76	6	3	5	4

LAMPIRAN 4

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PPID UTAMA BADAN POM TAHUN 2021

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permintaan Dikabulkan		Jumlah Permintaan Ditolak	Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian
			Sepenuhnya	Sebagian				
Januari 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
Februari 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
Maret 2021	2	11 Hari Kerja	2	0	0	0	0	0
Triwulan I (Januari - Maret) 2021	2	11 Hari Kerja	2	0	0	0	0	0
April 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
Mei 2021	1	17 Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
Juni 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
s/d Triwulan II (Januari - Juni) 2021	3	13 Hari Kerja	3	0	0	0	0	0
Juli 2021	1	2 Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
Agustus 2021	2	6 Hari Kerja	1	1	0	0	0	1
September 2021	1	14 Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
s/d Triwulan III (Januari - September) 2021	7	9,57 Hari Kerja	6	1	0	0	0	1
Okttober 2021	1	2 Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
November 2021	1	8 Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
Desember 2021	9	7,56 Hari Kerja	5	4	0	4	0	0
s/d Triwulan IV (Januari - Desember) 2021	18	8,06 Hari Kerja	13	5	0	4	0	1

LAMPIRAN 5

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PPID PELAKSANA UNIT KERJA BADAN POM TAHUN 2021

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permintaan yang Dikabulkan Sepenuhnya		Jumlah Permintaan Ditolak	Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
			Permintaan Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Didakumentasikan	Belum Diketahui
Januari 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
Februari 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
Maret 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
Triwulan I (Januari - Maret) 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
April 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
Mei 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
Juni 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
s/d Triwulan II (Januari - Juni) 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
Juli 2021	1	12 Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
Agustus 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
September 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
s/d Triwulan III (Januari - September) 2021	1	12 Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
Okttober 2021	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
November 2021	1	5 Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
Desember 2021	1	1 Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
s/d Triwulan IV (Januari - Desember) 2021	3	6 Hari Kerja	3	0	0	0	0	0

LAMPIRAN 6

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PPIID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN POM TAHUN 2021

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permintaan Dikabulkan		Jumlah Permintaan Ditolak	Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian	
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan
Januari 2021	2	1 Hari Kerja	2	0	0	0	0
Februari 2021	3	3,33 Hari Kerja	3	0	0	0	0
Maret 2021	6	3,25 Hari Kerja	6	0	0	0	0
Triwulan I (Januari - Maret) 2021	11	2,53 Hari Kerja	11	0	0	0	0
April 2021	8	1,56 Hari Kerja	8	0	0	0	0
Mei 2021	4	3 Hari Kerja	4	0	0	0	0
Juni 2021	6	4,92 Hari Kerja	6	0	0	0	0
s/d Triwulan II (Januari - Juni) 2021	29	2,84 Hari Kerja	29	0	0	0	0
Juli 2021	4	6,67 Hari Kerja	4	0	0	0	0
Agustus 2021	8	1 Hari Kerja	8	0	0	0	0
September 2021	1	1 Hari Kerja	1	0	0	0	0
s/d Triwulan III (Januari - September) 2021	42	2,86 Hari Kerja	42	0	0	0	0
Okttober 2021	4	1 Hari Kerja	4	0	0	0	0
November 2021	7	4 Hari Kerja	7	0	0	0	0
Desember 2021	11	2,75 Hari Kerja	7	1	3	1	3
s/d Triwulan IV (Januari - Desember) 2021	64	2,79 Hari Kerja	60	1	3	1	3



@PPIDBadanPOM



www.ppid.pom.go.id



@ppid_badanpom



ppid@pom.go.id



PPID BPOM Mobile